

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian terhadap konflik pekerjaan keluarga guru perempuan di Sekolah Menengah Kejuruan memberikan gambaran mendalam mengenai alasan seseorang memilih profesi, jenis permasalahan yang dialami serta aspek konflik pekerjaan keluarga yang paling sering dialami. Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti berhasil melakukan identifikasi dari studi literatur terhadap alasan seseorang perempuan memilih profesi guru. Ada dua macam alasan yang mendasari yang berasal dari dalam diri seseorang atau intrinsik. Rasa keinginan untuk memberikan pengetahuan dan pelayanan menjadi jawaban paling banyak dipilih oleh responden. Sedangkan alasan yang berasal dari luar diri atau ekstrinsik, mendapat dukungan dari keluarga/teman menjadi jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden.
2. Peneliti berhasil melakukan identifikasi jenis konflik pekerjaan keluarga dan aspek konflik keluarga dari studi literatur yang dilakukan. Ada tiga jenis konflik pekerjaan keluarga yaitu 1) Konflik berdasarkan ketegangan, 2) Konflik berdasarkan perilaku dan 3) Konflik berdasarkan waktu. Ada sepuluh aspek konflik pekerjaan keluarga yang dialami oleh guru perempuan yaitu 1) Peran, 2) Gender, 3) Dukungan, 4) Kepuasan, 5) Stress, 6) Komitmen, 7) Jadwal/Waktu, 8) Emosi, 9) Tuntutan, 10) Kelelahan.
3. Peneliti berhasil menemukan konflik pekerjaan keluarga yang paling sering dialami oleh guru perempuan di SMK. Untuk jenis konflik pekerjaan keluarga berdasarkan waktu menjadi hal yang paling sering dialami oleh guru perempuan di Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan aspek gender yang paling sering dialami dalam konteks pekerjaan keluarga, hal ini dapat menjadi penyebab konflik guru perempuan yang secara berkelanjutan dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental di tempat kerja dan di rumah.

5.2 Implikasi

Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan kajian ilmiah yang bersumber pada data. Hasil penelitian yang diperoleh terkait jenis konflik pekerjaan keluarga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan regulasi terkait hak pengajar perempuan yang juga dalam kegiatan penyusunan formasi untuk menentukan jumlah tenaga kependidikan dan pengajaran disatuan pendidikan.

Selanjutnya, hasil temuan terkait aspek konflik pekerjaan keluarga yang paling sering dialami oleh guru perempuan dapat digunakan sebagai pengembangan psikologis dan karir.

5.3 Rekomendasi

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi alasan yang mendasari mengapa guru produktif perempuan memilih profesi guru. Jenis konflik yang dialami dan aspek konflik yang paling sering dialami oleh guru perempuan, namun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini belum melibatkan responden dari setiap program keahlian yang ada di sekolah menengah kejuruan. Keterbatasan yang kedua ialah, peneliti dalam melakukan pengumpulan data melalui *kuisisioner* secara virtual, menemui kendala seperti hal pengumpulan informasi kontak untuk guru produktif tertentu sehingga belum dapat mewakili setiap sekolah dan program keahlian.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dikaitkan dengan tujuan maupun manfaat penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak. Pertama, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi konflik pekerjaan keluarga dengan melibatkan unsur pemerintah dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menemukan solusi permasalahan serta memperkuat ssebagai pemegang kebijakan. Kedua, rekomendasi untuk sekolah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi gender terhadap guru perempuan. Ketiga, guru perempuan juga hendaknya mau membuka diri dengan kemajuan teknologi serta ikut aktif terlibat dalam aktivitas untuk mempersiapkan peserta didik sebagai lulusan yang sesuai dengan zamannya serta

memperkuat pengetahuan akan hak-hak perempuan di dunia kerja. Keempat, pemerintah juga memprioritaskan adanya penegakan hukum yang berlaku berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan serta pemberian sanksi terhadap pelanggar peraturan yang berlaku, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, meningkatkan kesadaran hal kesetaraan gender bagi calon pekerja perempuan secara dini sebelum memasuki pasar kerja.